

## LAMPIRAN I

### JADWAL AUSTRALIA

#### CATATAN PENGANTAR

1. Demi kepastian yang lebih baik, elemen **Deskripsi** dari masing-masing entri Australia dalam Jadwalnya harus ditafsirkan sesuai dengan sumber kutipan yang relevan dari tindakan yang tidak sesuai (*non-conforming measures*).
2. Komitmen atas tindakan sehubungan dengan atau berkaitan dengan perdagangan dalam jasa finansial dilakukan sesuai dengan batas-batas dan tindakan yang ditetapkan dalam Bab 9 (Jasa Perdagangan), Bab 10 (Jasa Keuangan), Bab 14 (Penanaman Modal), Bagian ini dan Jadwal di bawah ini.
3. Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan batas-batas non-diskriminatif tentang masuknya suatu jasa keuangan baru ke pasar jika tindakan seperti itu diperlukan untuk mencapai tujuan kehati-hatian. Australia dapat menentukan bentuk kelembagaan dan yurisdiksi yang mana suatu jasa keuangan baru dapat dipasok dan dapat membutuhkan otorisasi untuk memasok jasa tersebut. Jika otorisasi untuk memasok jasa keuangan baru diperlukan, maka otorisasi hanya dapat ditolak karena alasan kehati-hatian.

<b>1. Sektor:</b>	Semua Sektor
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	Kerangka Penanaman Modal Asing Australia, yang terdiri atas Kebijakan Penanaman Modal Asing Australia (Australia's Foreign Investment Policy), <i>UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA)</i> ; <i>Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015 (Cth))</i> ; <i>UU Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 (Cth))</i> ; <i>Peraturan Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015 (Cth))</i> ; <i>UU Sektor Keuangan (Pemegang saham) 1998 (Persemakmuran) (Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 (Cth))</i> ; dan Pernyataan Kementerian ( <i>Ministerial Statements</i> ).
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal<sup>1</sup></u>  A. Penanaman modal <sup>2</sup> berikut harus berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Australia dan mungkin juga perlu diberitahukan <sup>3</sup> kepada Pemerintah Australia:  (a) penanaman modal yang diajukan oleh 'orang asing' * dalam sebuah entitas atau bisnis di Australia bernilai di atas 266 juta AUD;

<sup>1</sup>Demi kepastian yang lebih baik, persyaratan dalam entri ini harus ditafsirkan sesuai dengan Kerangka Penanaman Modal Asing Australia pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

<sup>2</sup> Istilah "penanaman modal" berarti kegiatan yang dicakup oleh Bagian II dari UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) atau, jika berlaku, pernyataan menteri tentang kebijakan penanaman modal asing. Pengaturan pendanaan yang mencakup instrumen utang yang memiliki kuasi-ekuitas akan diperlakukan sebagai penanaman modal asing langsung.

<sup>3</sup> UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) dan Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) menentukan biaya yang dikenakan untuk permohonan dan pemberitahuan penanaman modal asing. Biaya diindeks setiap tahunnya pada tanggal 1 Juli.

- (b) penanaman modal langsung yang diajukan oleh 'penanam modal pemerintah asing' terkait kepentingan apapun terlepas dari nilainya;
- (c) penanaman modal yang diajukan oleh orang asing\* yang bernilai 5 persen atau lebih di sektor media, terlepas dari nilai penanaman modal tersebut;
- (d) akuisisi yang diajukan oleh orang asing\* terkait minat dalam lahan<sup>4</sup> komersial yang sudah berkembang yang mana nilainya lebih dari 266 juta † AUD, kecuali lahan tersebut memenuhi syarat untuk batas lahan komersial yang sudah berkembang yaitu 58 juta AUD†<sup>5</sup>.

Penanaman modal dapat ditolak, sesuai dengan arahan atau disetujui sesuai dengan syarat-syarat. Orang asing\* yang tidak mematuhi kerangka penanaman modal asing dapat dikenakan hukuman perdata dan pidana.

Demi kepastian yang lebih baik, jika suatu penanaman modal bisa memenuhi syarat untuk aplikasi atas satu atau lebih dari ambang batas penyaringan di atas, syarat persetujuan atau pemberitahuan akan berlaku dari ambang batas terendah yang berlaku.

Persyaratan terpisah atau tambahan mungkin berlaku atas persyaratan tersebut dan harus sesuai dengan entri Lampiran I lainnyadan dengan sektor, sub-sektor atau kegiatan sesuai dengan Lampiran II.

B. Akuisisi saham dalam suatu perusahaan sektor finansial yang telah ada oleh penanam modal asing, atau penanam modal asing yang memasuki suatu perjanjian yang akan mengakibatkan keadaan saham yang tidak dapat diterima atau untuk kontrol praktis<sup>6</sup> dalam suatu perusahaan sektor finansial yang telah ada dapat ditolak, atau harus mematuhi tindakan<sup>7</sup> tertentu.

---

<sup>4</sup> Istilah "tanah komersial yang sudah berkembang" berarti tanah komersial yang tidak kosong sesuai arti dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) dan Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran).

<sup>5</sup> Tindakan untuk ambang batas rendah adalah yang ditetapkan dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) dan Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran).

<sup>6</sup> "Situasi saham yang tidak dapat diterima" dan "kontrol praktis" sebagaimana didefinisikan dalam UU Sektor Keuangan (Pemegang saham) 1998 (Persemakmuran).

<sup>7</sup> Pernyataan Kementerian terkait kebijakan penanaman modal asing termasuk Siaran Pers Perbendaharaan (*Treasurer's Press Release*) No. 28 of 9 April 1997.

\*Istilah "orang asing" memiliki arti sebagaimana tertera dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) dan Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran)

† Berikut adalah angka pada tanggal 1 Januari 2019. Untuk diindeks setiap tahunnya pada tanggal 1 Januari.

<b>2 Sektor:</b>	Semua Sektor
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6) Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Daerah
<b>Sumber Tindakan:</b>	Semua tindakan yang tidak sesuai ( <i>non-conforming measures</i> ) yang ada pada pemerintahan tingkat daerah
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Semua tindakan yang tidak sesuai ( <i>non-conforming measures</i> ) yang ada pada pemerintahan tingkat daerah

<b>3 Sektor:</b>	Semua Sektor
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Korporasi 2001 (Persemakmuran) <i>Corporations Act 2001</i> (Cth) Peraturan Korporasi 2001 (Persemakmuran) <i>Corporations Regulations 2001</i> (Cth)
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Setidaknya seorang direktur suatu perusahaan tertutup harus penduduk yang biasanya bermukim di Australia.  Setidaknya dua orang direktur suatu perusahaan terbuka harus penduduk yang biasanya bermukim di Australia.  Setidaknya seorang sekretaris suatu perusahaan tertutup (jika perusahaan tertutup tersebut menunjuk satu orang sekretaris atau lebih) harus penduduk yang biasanya bermukim di Australia.  Setidaknya seorang sekretaris suatu perusahaan terbuka harus penduduk yang biasanya bermukim di Australia.

<b>4. Sektor:</b>	Jasa Profesional
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 ) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	<i>UU Hak Paten 1990 (Persemakmuran) Patents Act 1990 (Cth)</i> <i>Peraturan Hak Paten 1990 (Persemakmuran) Patents Regulations 1990 (Cth)</i>
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa</u>

Untuk mendaftarkan diri supaya dapat berpraktik di Australia, pengacara hak paten harus dipekerjakan setidaknya selama dua tahun secara berkesinambungan atau selama total dua tahun dalam lima tahun berkesinambungan, di Australia atau Selandia Baru, atau di kedua negara tersebut, yang memegang posisi yang bisa menyediakan pengalaman yang diperlukan bagi pemohon dalam rezim pengacara hak paten di Australia dan Selandia Baru.

<b>5. Sektor:</b>	Jasa profesional
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	Undang-undang Migrasi 1958 (Persemakmuran) <i>Migration Act 1958</i> (Cth)
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa</u>  Untuk menjalankan praktik sebagai seorang agen migrasi di Australia maka seseorang harus merupakan warga negara atau penduduk tetap Australia atau warga negara Selandia Baru yang memiliki visa kategori khusus.



**6. Sektor:** Jasa profesional

**Kewajiban  
Terkait:** Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)

**Tingkat  
Pemerintahan:** Pusat

**Sumber  
Tindakan:** UU Korporasi 2001 (Persemakmuran) *Corporations Act 2001*  
(*Cth*)

**Deskripsi** Perdagangan Jasa

Seseorang yang biasanya tidak bermukim di Australia dapat ditolak jika mendaftar sebagai seorang auditor atau likuidator perusahaan.

Setidaknya seorang mitra dalam suatu perusahaan yang menyediakan jasa audit harus merupakan auditor perusahaan terdaftar yang biasanya bermukim di Australia.

<b>7. Sektor:</b>	Jasa profesional
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Kepabeanan 1901 (Persemakmuran) ( <i>Customs Act 1990</i> (Cth))
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa</u>  Untuk bertindak sebagai pialang kepabeanan di Australia, pemasok jasa harus menyediakan jasa tersebut di dalam dan dari Australia.

<b>8. Sektor:</b>	Penangkapan ikan dan jasa yang berhubungan dengan penangkapan ikan
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Pengelolaan Penangkapan Ikan 1991 (Persemakmuran) ( <i>Fisheries Management Act 1991</i> (Cth)) UU Pajak Lisensi Penangkapan Ikan Asing 1991 (Persemakmuran) ( <i>Foreign Fishing Licences Levy Act 1991</i> (Cth))
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Kapal-kapal nelayan asing <sup>8</sup> yang hendak melakukan penangkapan ikan, termasuk kegiatan yang mendukung atau dalam persiapan untuk penangkapan ikan atau pengolahan ikan, pengangkutan atau transportasi pengiriman ikan, di Zona Perikanan Australia harus memiliki izin.  Jika kapal-kapal nelayan asing memiliki izin maka mereka dapat dikenakan retribusi <sup>10</sup> .

---

<sup>8</sup> Untuk tujuan entri ini, suatu "kapal nelayan asing" adalah kapal yang tidak memenuhi definisi perahu Australia di bawah *UU Pengelolaan Penangkapan Ikan 1991 (Persemakmuran)*

<sup>10</sup> Pungutan biaya retribusi akan sesuai dengan *UU Pajak Lisensi Penangkapan Ikan Asing 1991 (Persemakmuran)* atau amandemen yang dilakukan setelahnya.

<b>9. Sektor:</b>	Jasa Komunikasi
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Korporasi Telstra 1991 (Persemakmuran) ( <i>Telstra Corporation Act 1991 (Cth)</i> )
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Agregat ekuitas asing dibatasi untuk tidak lebih dari 35 persen saham Telstra. Penanaman modal asing individu atau kelompok terasosiasi dengannya dibatasi untuk tidak lebih dari 5 persen saham.  Direktur Utama dan mayoritas direksi Telstra haruslah warga negara Australia dan Telstra harus mempertahankan kantor pusatnya, basis utama operasi dan lokasi inkorporasinya di Australia.

<b>10. Sektor:</b>	Jasa Kesehatan
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Laboratorium Serum Negara Persemakmuran 1961 (Persemakmuran) ( <i>Commonwealth Serum Laboratories Act 1961</i> (Cth))
<b>Deskripsi</b>	<p><u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u></p> <p>Suara yang melekat pada pemegang saham<sup>11</sup> asing yang signifikan tidak boleh dihitung dalam rangka mengganti atau mengeluarkan lebih dari sepertiga direksi Laboratorium Serum Persemakmuran (<i>Commonwealth Serum Laboratories</i> (CSL)) yang akan memegang jabatan dalam suatu periode.</p> <p>Kantor pusat, fasilitas utama yang digunakan oleh CSL dan setiap anak perusahaan CSL yang digunakan untuk memproduksi produk yang berasal dari plasma manusia yang diambil dari darah atau, dari plasma yang disumbangkan oleh perorangan di Australia harus tetap berada di Australia,</p> <p>Dua-pertiga dewan direksi CSL dan ketua dalam setiap rapat haruslah warga negara Australia. CSL tidak boleh berusaha menginkorporasikan diri di luar Australia.</p>

---

<sup>11</sup> Untuk tujuan entri ini, "pemegang saham asing yang signifikan" berarti memegang saham pemungutan suara di CSL, yang mana orang asing memiliki kepentingan yang relevan, jika orang asing tersebut memiliki kepentingan yang relevan atas setidaknya 5 persen saham pemungutan suara di CSL.

<b>11. Sektor:</b>	Jasa transportasi
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Kompetisi dan Konsumen 2010 (Persemakmuran) <i>Competition and Consumer Act 2010 (Cth)</i>
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>

Setiap kapal induk laut yang menyediakan jasa pengiriman kargo liner internasional ke dan dari Australia harus, pada setiap waktu, diwakili oleh orang perseorangan yang merupakan penduduk di Australia.

Hanya orang<sup>12</sup> yang terkena dampak persetujuan konferensi terdaftar atau kapal-induk laut non-konferensi terdaftar yang memiliki kekuatan pasar substansial yang dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Kompetisi dan Konsumen Australia (*Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)*) untuk memeriksa apakah anggota konferensi, dan operator non-konferensi yang memiliki kekuatan pasar substansial, memang menghalangi operator pengapalan lainnya untuk bekerja efisien sesuai tindakan jasa jalur kargo sampai pada tingkat yang sewajarnya. Supaya lebih pasti, hal-hal yang relevan dengan penentuan istilah "masuk akal" termasuk kepentingan Nasional Australia dan kepentingan perkapalan Australia.

---

<sup>12</sup> Untuk tujuan entri ini, bab 10.48 dan 10.58 dari Bagian X dari *UU Kompetisi dan Konsumen 2010 (Persemakmuran)* berisi daftar kategori orang untuk penerapan entri ini.

<b>12. Sektor:</b>	Jasa transportasi
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 14.4) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	Undang-undang Navigasi Udara 1920 (Persemakmuran) ( <i>Air Navigation Act 1920</i> (Cth)) Pernyataan Kementerian
<b>Deskripsi</b>	<p><u>Penanaman Modal</u></p> <p>Jumlah total kepemilikan asing setiap maskapai penerbangan internasional Australia (selain Qantas) dibatasi pada jumlah maksimum sebesar 49%.</p> <p>Selain itu, disyaratkan supaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setidaknya dua pertiga dewan direksi haruslah warga negara Australia;</li> <li>• Ketua Dewan direksi haruslah warga negara Australia;</li> <li>• kantor pusat maskapai harus berada di Australia; dan</li> <li>• basis operasi maskapai harus berada di Australia.</li> </ul>

<b>13. Sektor:</b>	Jasa transportasi
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 14.4 ) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Penjualan Qantas 1992 (Persemakmuran) ( <i>Qantas Sale Act 1992</i> (Cth))
<b>Deskripsi</b>	<u>Penanaman Modal</u>  Total kepemilikan asing pada Qantas Airways Ltd dibatasi maksimum sebesar 49%.  Sebagai tambahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kantor Pusat Qantas harus selalu berada di Australia;</li> <li>• sebagian besar fasilitas operasional Qantas harus berada di Australia;</li> <li>• setidaknya dua pertiga dari direksi Qantas harus selalu merupakan warga negara Australia</li> <li>• pada pertemuan dewan direksi Qantas, direktur yang memimpin pertemuan (bagaimana pun penjelasannya) harus merupakan warga negara Australia: dan</li> <li>• Qantas dilarang mengambil tindakan apapun untuk tujuan inkorporasi di luar Australia.</li> </ul>



<b>14. Sektor:</b>	Jasa Keuangan
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Akses Pasar (Pasal 9.5)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	<i>UU Perbankan 1959 (Persemakmuran) (Banking Act 1959 (Cth))</i> <i>UU (Peraturan) Sistem Pembayaran 1998 (Persemakmuran) (Payment Systems (Regulation) Act 1998 (Cth))</i>
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Untuk menjalankan bisnis perbankan di Australia suatu entitas harus merupakan suatu badan hukum dan memiliki izin sebagai suatu lembaga penerima-deposit berizin (authorised deposit-taking institution (ADI))  Lembaga penerima-deposit asing (termasuk bank asing) hanya boleh mengoperasikan suatu bisnis perbankan di Australia melalui anak perusahaan penerima-deposit terinkorporasi atau cabang-cabang resmi (ADI asing), atau melalui kedua struktur tersebut.  Cabang suatu bank asing yang diberi wewenang sebagai suatu lembaga penerima-deposit berizin di Australia (ADI asing) tidak diizinkan untuk menerima deposito awal (dan dana lain) dari individu dan lembaga non-perusahaan yang berjumlah kurang dari 250.000 AUD.  Kantor perwakilan suatu bank asing tidak diizinkan melakukan bisnis perbankan apa pun, termasuk iklan untuk deposito, di Australia. Kantor perwakilan tersebut hanya diizinkan untuk bertindak sebagai titik penghubung.

<b>15. Sektor:</b>	Jasa Keuangan
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Perbankan Commonwealth 1959 (Persemakmuran) <i>Commonwealth Banks Act 1959</i> (Cth))
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Kewajiban Bank Commonwealth, yang sebelumnya dimiliki Pemerintah Australia, tercakup dalam perjanjian garansi transisi.

<b>16. Sektor:</b>	Jasa Keuangan
<b>Sub sektor:</b>	Jasa asuransi jiwa
<b>Kewajiban Terkait:</b>	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5) Akses Pasar (Pasal 9.5)
<b>Tingkat Pemerintahan:</b>	Pusat
<b>Sumber Tindakan:</b>	UU Asuransi Jiwa 1995 (Persemakmuran) ( <i>Life Insurance Act 1995</i> (Cth))
<b>Deskripsi</b>	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u>  Persetujuan atas asuransi jiwa non-residen terbatas pada anak perusahaan terinkorporasi berdasarkan hukum Australia.